

MANAJEMEN BENCANA OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM MENANGGULANGI BANJIR DI KELURAHAN PEDURENAN KECAMATAN KARANG TENGAH KOTA TANGERANG

Muhamad Baihaki¹, Khikmawanto², Muhammad Arief³

^{1,2,3}Universitas Yuppentek Indonesia

Email: bayhaki.kote@gmail.com, ¹ khikmawanto6@gmail.com², ariefjdsk659@gmail.com³

Abstract

Flood is a natural disaster that frequently occurs in coastal cities of Indonesia, and the government has a responsibility to mitigate its impacts through mitigation, emergency response, and post-disaster rehabilitation. The concept of disaster management, as described by W. Nick Carter, includes stages of prevention, mitigation, preparedness, disaster impact, response, recovery, and development. The National Disaster Management Agency (BNPB) was established by the government based on laws and presidential regulations, with local governments playing a significant role in disaster management according to applicable laws. In 2020, Tangerang City experienced significant flooding, especially in the districts of Karang Tengah and Pinang, resulting in thousands of families and individuals being affected and evacuated. The Tangerang City BPBD needs to have a strong response capacity and continually improve the capacity of human resources, institutions, infrastructure, and cooperation to deal with such situations. This research focuses on the efforts and hindering factors faced by the Tangerang City BPBD in handling the 2020 flood in the Pedurenan Sub-district, using qualitative research methods. The research results show the commitment of the Tangerang City BPBD in addressing the threat of flooding through proactive measures such as staff training, evacuation planning, and the KENCANA program, with a primary focus on strengthening infrastructure and community participation. The findings of this research are expected to serve as a basis for improving and developing policies and disaster management strategies in the future. In conclusion, the Tangerang City BPBD has taken significant steps to reduce flood risks and enhance community resilience through a holistic and proactive approach involving training, evacuation planning, infrastructure improvement, community participation, and inter-agency coordination. While progress has been made, there is still room for improvement to make flood disaster responses more effective in the future.

Keywords: Disaster Management, Regional Disaster Management Agency (BPBD), Floods, Tangerang City.

Abstrak

Banjir adalah bencana alam yang kerap terjadi di kota-kota pesisir Indonesia, dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengurangi dampaknya melalui mitigasi, tanggap darurat, dan rehabilitasi pasca bencana. Konsep manajemen bencana, sebagaimana dijelaskan oleh W. Nick Carter, mencakup tahapan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dampak bencana, tanggapan, pemulihan, dan pembangunan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dibentuk oleh pemerintah berdasarkan undang-undang dan peraturan presiden, dengan peran penting pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana sesuai undang-undang yang berlaku. Pada tahun 2020, Kota Tangerang mengalami banjir yang signifikan, terutama di Kelurahan pedurenan Kecamatan Karang Tengah, yang mengakibatkan ribuan keluarga dan individu terdampak dan dievakuasi. BPBD Kota Tangerang perlu memiliki daya tanggap yang kuat dan terus meningkatkan kapasitas SDM, lembaga, sarana prasarana, dan kerjasama untuk menghadapi situasi seperti ini. Penelitian ini berfokus pada upaya dan faktor penghambat yang dihadapi BPBD Kota Tangerang dalam menangani banjir di Kelurahan Pedurenan pada tahun 2020, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan komitmen BPBD dalam menghadapi ancaman banjir melalui tindakan

proaktif, seperti pelatihan petugas, perencanaan evakuasi, dan program KENCANA, dengan fokus utama pada penguatan infrastruktur dan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan serta strategi penanggulangan bencana di masa depan. Kesimpulannya, BPBD Kota Tangerang telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam mengurangi risiko banjir dan meningkatkan ketahanan komunitas melalui pendekatan holistik dan proaktif yang melibatkan pelatihan, perencanaan evakuasi, penguatan infrastruktur, partisipasi masyarakat, serta koordinasi lintas-instansi. Meskipun sudah baik, masih ada ruang untuk perbaikan agar respons terhadap bencana banjir menjadi lebih efektif di masa depan.

Kata kunci: Manajemen Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Banjir, Kota Tangerang

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 24 Tahun (2007) tentang Penanggulangan Bencana pasal 18 menjadi dasar Pemerintah Kota Tangerang melakukan upaya dalam untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Keberadaan BPBD tidak menghilangkan/mengurangi peranan lembaga-lembaga lain pada penanggulangan bencana, melainkan BPBD melaksanakan komando, fungsi koordinasi, & pelaksana.

Kota Tangerang pada tahun 2020 silam lebih khususnya pada bulan Januari, pernah mengalami bencana banjir, beberapa lokasi yang mengalami dampak tersebut ialah Kecamatan Karang Tengah dan Pinang. Banjir terjadi dibulan januari 2020. Kecamatan yang terkena banjir adalah Kecamatan Karang Tengah dan Kecamatan Pinang, dengan jumlah KK yang Terendam 8110 KK dan jumlah jiwa yang di evakuasi 28274 Jiwa dari Kecamatan Karang Tengah dan 215 jumlah KK yang terendam serta 1187 Jiwa yang di Evakuasi dari Kecamatan Pinang. Apabila dilihat dari jumlah korban yang terendam sebanyak 215 dalam jumlah KK di wilayah Pinang dan Karang Tengah, Otoritas publik harus memiliki daya tanggap yang tinggi dan secara konsisten bekerja pada kemampuannya dalam hal batasan SDM, kapasitas kelembagaan, aksesibilitas sarana dan prasarana dan partisipasi atau kerjasama. Guna mencapai manajemen penanganan bencana yang *effectiveness, efficiency, dan responsiveness*, BPBD perlu merancang rangkaian upaya. Isu manajemen bencana di dalam BPBD memiliki urgensi tinggi agar dapat meningkatkan kualitas layanan.

Melalui manajemen bencana ini, mulai dari tingkat individu, berkembang pada tingkatan organisasi sampai evaluasi dalam lingkup sistem akan dianalisis dan ditelaah serta dicari rangkaian strategi apa yang akan dilakukan guna membenahi respons aparaturnya publik.

Hal ini penting untuk menjawab kesulitan para pengelola yang merupakan pemerintah, dalam hal ini BPBD sebagai garda depan harus berupaya untuk meningkatkan

limit di berbagai bidang seperti aset, organisasi, dan kerjasama dari berbagai pihak yang seharusnya tercipta. keterampilan yang mengesankan dalam penyelesaian papan untuk menghadapi peristiwa bencana yang terjadi.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada manajemen bencana BPBD dalam penanganan bencana banjir yang telah dilakukan pada bulan Januari 2020 silam, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya yang telah dilakukan oleh BPBD dalam menangani bencana banjir di Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah, serta untuk mengidentifikasi Faktor penghambat yang dialami oleh BPBD dalam menghadapi bencana tersebut.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang manajemen bencana BPBD dan praktik terbaik dalam penanganan bencana banjir di tingkat daerah. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi landasan untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan serta strategi penanganan bencana di masa mendatang. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi BPBD dan pihak terkait dalam meningkatkan kapasitas dan efektivitas dalam menghadapi bencana banjir di Kota Tangerang.

KAJIAN PUSTAKA

Gagasan Administrasi merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk merancang, mengkoordinasikan, mempersiapkan, mengendalikan dan membina segala upaya untuk memilah dan menggunakan SDM, kantor dan yayasan untuk mencapai tujuan hierarkis yang telah ditetapkan dengan sungguh-sungguh dan efisien. Calamity the executive adalah siklus yang terus-menerus di mana otoritas publik, dunia usaha, dan masyarakat umum merencanakan dan mengurangi dampak bencana, mengambil tindakan setelah terjadi kegagalan, dan mengambil langkah pemulihan (Susanto 2006:10). Ini adalah siklus yang signifikan dalam menjawab aktivitas dan tujuan pascabencana. Oleh karena itu, diperlukan proses lintas sektoral yang terkoordinasi dan masuk akal untuk mencegah dan mengurangi dampak kegagalan, termasuk moderasi, kehati-hatian, reaksi terhadap bencana dan upaya pemulihan. (Warto 2002:23)

Manajemen bencana merupakan rangkaian upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya bencana, serta kemampuan administrasi yang meliputi koordinasi,

pengaturan, pengendalian dan penghasutan bencana maka para pengurus juga memerlukan keempat kemampuan tersebut. Manajemen bencana adalah tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan bencana dan krisis tanpa henti, serta memberikan kerangka acuan untuk membantu individu yang berjudi tinggi untuk menghindari atau memulihkan diri dari dampak kegagalan (Sinaga, 2015). Catastrophe the executive merupakan sebuah kajian informasi yang berkonsentrasi pada berbagai sudut pandang kegagalan, khususnya bahaya bencana dan cara menghindari risiko bencana yang terjadi.

Tingkat penentuan risiko bencana di suatu wilayah dipengaruhi oleh tiga elemen, yaitu bahaya, kelemahan, dan batasan. Besarnya pertaruhan dapat diperkecil dengan adanya kapasitas, khususnya keadaan wilayah setempat yang mempunyai kekuatan dan kapasitas untuk memahami dan mengevaluasi jenis bahaya yang ditimbulkannya, serta bagaimana wilayah setempat dapat memanfaatkan dan menyelamatkan. iklim dan aset yang ada, dimana dalam kondisi ini daerah setempat mengambil bagian yang signifikan sebagai penerima dan penerima manfaat. Bencana adalah bagian penting dari upaya menangani iklim secara umum untuk mengurangi risiko bencana. Bencana adalah peristiwa yang mengganggu dan membahayakan kehidupan individu yang disebabkan oleh unsur-unsur biasa dan tidak normal atau variabel manusia, yang menyebabkan kemunduran, kerugian alam, dan hilangnya harta benda. Bencana dibagi menjadi tiga jenis, peristiwa bencana pertama dan terpenting, yaitu bencana spesifik yang disebabkan oleh faktor-faktor normal seperti gempa bumi, gelombang, emisi, gunung berapi, angin topan, dan banjir. Kedua, bencana yang disebabkan oleh faktor-faktor non-normal seperti kerusakan mekanis, kerusakan, atau kelebihan populasi zat. Dan ketiga, bencana sosial, khususnya bencana yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti perselisihan sosial (Awusi et al., 2018).

Definisi Bencana (*Disaster*) menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah peristiwa atau peristiwa dalam suatu ruang yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup, hilangnya nyawa manusia, dan melemahnya kesejahteraan secara besar-besaran sehingga memerlukan bantuan luar biasa dari pihak luar. Bencana adalah peristiwa-peristiwa yang menimbulkan dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh unsur-unsur kewajaran, variabel-variabel tidak tetap, dan faktor manusia sehingga dapat menimbulkan kemunduran manusia, kerugian alam, kerugian harta benda, dan akibat-akibat batin akibat kerugian yang dialami. serta membutuhkan dukungan dari luar. dalam mengatasinya. Oleh karena itu, upaya

diharapkan dapat mengurangi pertaruhan kemalangan jika terjadi kegagalan. Penurunan risiko bencana diartikan sebagai proses penguatan daerah melalui pengalaman bertahan dan mengelola bencana yang berpusat pada latihan partisipatif untuk mengarahkan pemeriksaan, mengatur, memilah pertemuan, dalam menangani bencana sebelum, selama dan setelah bencana terjadi. Intinya adalah agar jaringan dapat mengawasi peluang, mengurangi dan memulihkan dampak kegagalan (Husein & Onasis, 2017).

Inti upaya dari bencana yang diupayakan oleh para eksekutif adalah untuk mengurangi jumlah orang yang selamat dari penyakit, risiko kecacatan dan kematian ketika bencana terjadi, mencegah atau mengurangi pertaruhan berkembangnya penyakit-penyakit yang tidak dapat diatasi dan penyebarannya, serta mencegah atau mengurangi pertaruhan dan kekalahan alami. pengaruh kesejahteraan akibat bencana.

Sedangkan Menurut (Carter, 1991) dibutuhkan siklus manajemen menghadapi bencana untuk tiap negara, yang meliputi : Pencegahan (*Prevention*), Mitigasi Atau Memperkecil Efek Bencana (*Mitigation*), Kesiapsiagaan (*Preparedness*), Respon atau Reaksi Cepat (*Response*), Perbaikan (*Recovery*), Pengembangan (*Development*).

a. Pencegahan (*Prevention*)

Ukur dan antisipasi kegagalan apa yang akan terjadi. Tentu saja, pada dasarnya sangat sulit untuk mengantisipasi di mana suatu bencana akan terjadi, namun kita dapat (mencoba) mencegahnya dengan, misalnya: membuat bangunan yang cukup mampu menahan guncangan, membangun rumah yang tidak terlalu dekat dengan laut atau mungkin berfokus pada prasyarat standar keamanan pembangunan, dan lain sebagainya.

b. Mitigasi (*Mitigation*)

Tindakan mitigasi dapat digunakan sebagai langkah mitigasi. Hal ini dilakukan agar jika terjadi kegagalan, program ini dapat membatasi jumlah korban jiwa dan kerugian.

c. Kesiapsiagaan (*Preparedness*)

Dengan prinsip-prinsip reaksi bencana yang harus ditetapkan oleh otoritas publik dan dikaitkan dengan masyarakat luas, diyakini dapat mempersiapkan daerah setempat, baik secara lokal maupun secara kolektif, untuk selalu siap menghadapi bencana yang paling mengerikan dan mengerikan. menjauhkan diri dari kegilaan massal. Kesiapan dalam menghadapi bencana dapat dibedakan menjadi 3 bagian, antara lain: Peringatan (*Warning*), Ancaman (*Threat*), dan Tindakan Pencegahan (*Precaution*)

d. Reaksi Cepat (*Response*)

Respons cepat biasanya dapat dilakukan sedini mungkin selama atau setelah segala sesuatunya berjalan tidak beres. Dengan menyiapkan tenaga pengajar secara lokal, diyakini daerah setempat bisa mandiri menyelesaikan pengobatan dini sebelum bantuan datang. Aktivitas normalnya adalah menyelamatkan nyawa korban dan menjaga kelebihan harta benda.

e. Perbaikan (*Recovery*)

Proses perbaikan berfokus pada kebutuhan pokok para korban bencana, misalnya tempat berlindung, sterilisasi dan jamban, kemudian dilanjutkan dengan peningkatan fondasi yang membantu mempercepat pemulihan sektor keuangan di wilayah yang terkena dampak bencana.

f. Pengembangan (*Development*)

Dibutuhkan pengembangan simulasi-simulasi berbagai macam bencana yang mungkin menghantam negara kita sehingga kita dapat selalu siap menghadapi dampak dari bencana tersebut. Carter juga memahami bahwa pandangannya mengenai jaminan strategi bencana publik pada awalnya harus melalui penilaian berikut:

1. Identifikasi jenis bencana ancaman dan pengaruhnya
2. Inventarisasi sumber daya dengan mempertimbangkan sumber daya yang dipakai untuk melakukan tindakan penanggulangan
3. Pengaturan Organisasional

Penelitian ini berfokus pada analisis dan penelitian mengenai Manajemen Bencana, dengan poin-poin utama yang terdiri dari empat indikator utama berikut:

1. Pencegahan (*Prevention*): Indikator ini mengacu pada upaya-upaya yang dilakukan sebelum terjadinya bencana untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bencana atau meminimalisir dampaknya. Pencegahan melibatkan langkah-langkah seperti pengurangan risiko, kontrol lingkungan, penegakan peraturan, dan kampanye kesadaran masyarakat untuk menghindari situasi yang berpotensi menyebabkan bencana.
2. Mitigasi (*Mitigation*): Mitigasi adalah serangkaian tindakan untuk mengurangi dampak bencana jika bencana tersebut tidak dapat dihindari sepenuhnya. Indikator ini mencakup langkah-langkah seperti pemetaan risiko, perencanaan tata ruang yang lebih aman, penguatan infrastruktur, dan pengembangan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kerentanan masyarakat dan aset-aset penting.

3. Kesiapsiagaan (*Preparedness*): Indikator kesiapsiagaan berkaitan dengan upaya persiapan yang dilakukan sebelum bencana terjadi untuk meningkatkan kemampuan tanggap dan reaksi terhadap bencana. Kesiapsiagaan melibatkan perencanaan evakuasi, pelatihan petugas penanggulangan bencana, simulasi bencana, penyusunan rencana darurat, dan penyediaan sarana komunikasi darurat.
4. Reaksi Cepat (*Response*): Indikator ini mencakup langkah-langkah yang diambil selama atau segera setelah terjadi bencana untuk menyelamatkan nyawa, memberikan pertolongan, dan meredam dampak yang lebih lanjut. Reaksi cepat melibatkan mobilisasi tim penanggulangan bencana, penyediaan bantuan medis dan makanan, evakuasi masyarakat yang terdampak, serta pendirian pusat koordinasi untuk memastikan respons yang terkoordinasi dan efisien.

Perumusan masalah yang dibuat yaitu sebagai berikut: 1) Bagaimana manajemen bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang dalam menanggulangi Banjir di Kelurahan Pedurenan pada tahun 2020? 2) Faktor-faktor Apa saja yang mempengaruhi manajemen bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang dalam menanggulangi Banjir?

METODE PENELITIAN

Selama melakukan eksplorasi ini, para ilmuwan menggunakan teknik subjektif, yaitu dengan cara mengumpulkan informasi melalui persepsi dan pertemuan, atau disebut dengan informasi esensial, dimana informasi tersebut diperoleh dari arsip BPBD Kota Tangerang, sedangkan informasi opsional adalah hasil yang ditangani pencipta. diambil dari beberapa sumber. referensi buku, catatan harian dan laporan pendukung lainnya.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analitis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau metode kuantifikasi lainnya. Jelas sekali pengertian tersebut membedakan penelitian kualitatif dengan penelitian yang bernuansa kuantitatif, yaitu dengan menekankan bahwa segala upaya kuantifikasi tidak perlu digunakan dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun gambaran rinci, holistik dan kompleks tentang apa yang diteliti. Moleong (2007:6)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen Bada Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang dalam penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Karang Tengah. Serta apa saja hal yang mendukung Manajemen bencana BPBD

sehingga mampu melakukan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, dan jika ada, sekiranya apa saja hambatan yang sering dialami oleh BPBD Kota Tangerang dalam upaya menanggulangi bencana banjir.

Penentuan narasumber dilakukan dengan menggunakan saksi-saksi kunci, khususnya orang-orang yang mempunyai informasi dan dapat memahami keadaan sebenarnya dari objek pemeriksaan untuk mendapatkan informasi yang diharapkan dan memperoleh informasi yang jelas mengenai penyelenggaraan Kegaduhan Daerah Kota Tangerang. Badan Pelaksana (BPBD) dalam penanggulangan bencana. Banjir di Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang.

Orang-orang yang berada dalam ruang lingkup penelitian dan mampu memberikan informasi tentang keadaan tempat penelitian disebut informan. Untuk memberikan pandangan orang dalam mengenai nilai, sikap, bangunan, proses, dan budaya yang menjadi latar belakang penelitian lokal, ia harus mempunyai banyak pengalaman terhadap masalah penelitian dan menjadi sukarelawan sebagai sumber informasi, Informan-informannya adalah :

1. Sekretaris BPBD Kota Tangerang
2. Kepala Seksi Pencegahan BPBD Kota Tangerang
3. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tangerang
4. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Tangerang
5. Masyarakat yang berada di daerah rawan bencana banjir

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Pedurenan adalah kelurahan yang berada di kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten, Indonesia. Kelurahan ini terbagi atas 88 rukun tetangga dan 12 rukun warga. Sebagai lembaga pemerintah non departemen, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penanggulangan bencana di provinsi dan kabupaten/kota. BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

2. Manajemen Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Banjir Di Kelurahan Pedurenan Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang (2020)

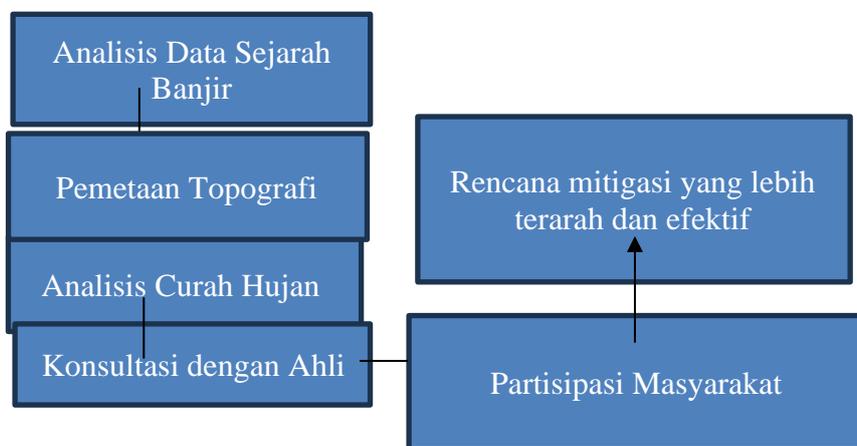
Melalui pengembangan program Badan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah Tangerang, dalam hal ini Badan Pengurus Bencana Daerah Kota Tangerang, dapat melakukan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dengan permasalahan pengurus bencana. Konsep Sistem Penanggulangan Bencana berdasarkan temuan penelitian penanggulangan bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (*Disaster Management System*) menurut Carter dalam buku *Disaster Management : A Disaster Manager's Handbook*, Candra (2014). Dibutuhkan alur manajemen menghadapi bencana untuk setiap negara, yang meliputi : Pencegahan (*Prevention*), Mitigasi Atau Memperkecil Efek Bencana (*Mitigation*), Kesiapsiagaan (*Preparedness*), Respon atau Reaksi Cepat (*Response*).

a. Pencegahan (*Prevention*) Dalam Penanggulangan Banjir Manajemen Bencana Banjir

Program KENCANA (Kecamatan Tangguh Bencana) yang diperkenalkan oleh Kementerian Dalam Negeri merupakan langkah proaktif yang diambil oleh BPBD Kota Tangerang dalam upaya pencegahan bencana. Program ini mencerminkan komitmen yang kuat dalam membangun ketahanan terhadap bencana di tingkat kecamatan. Dalam alur program KENCANA yang tergambar di atas, langkah-langkah strategis terlihat bahwa dengan adanya program KENCANA, BPBD Kota Tangerang secara aktif memainkan peran penting dalam upaya pencegahan bencana. Langkah-langkah yang terstruktur dan komprehensif dalam program ini menunjukkan komitmen nyata untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap ancaman bencana, serta membangun koordinasi dan kolaborasi yang kuat di tingkat daerah maupun nasional

b. Mitigasi (*Mitigation*) Manajemen Bencana Banjir

Mitigasi atau usaha memperkecil efek bencana adalah untuk mengurangi dampak bencana jika bencana tersebut tidak dapat dihindari sepenuhnya. Indikator ini mencakup langkah-langkah seperti pemetaan risiko, perencanaan tata ruang yang lebih aman, penguatan infrastruktur, dan pengembangan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kerentanan masyarakat dan aset-aset penting. Dalam penerapannya terdapat salah satu contoh usaha dari BPBD Kota Tangerang dalam hal mitigasi terkait bencana banjir adalah dengan pemetaan risiko banjir, seperti yang dapat dilihat dalam alur berikut ini:



Gambar 2. Alur pemetaan risiko banjir

Dari alur tersebut dapat diketahui bahwa BPBD Kota Tangerang menginginkan rencana mitigasi yang terarah dan efektif. Melalui analisis data sejarah banjir, pemetaan topografi, analisis curah hujan, konsultasi dengan ahli, dan partisipasi Masyarakat. Untuk mengetahui lebih jelasnya terkait hal-hal mitigasi apa yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang dalam kasus banjir di kelurahan Pedurenan pada tahun 2020, Berikut ini pernyataan dari beberapa informan terkait dengan pemetaan risiko banjir di kelurahan pedurenan, tata ruang yang telah disusun oleh BPBD untuk menciptakan wilayah yang lebih aman dari banjir, langkah konkret yang dilakukan BPBD untuk memperkuat infrastruktur agar lebih tahan terhadap banjir

Langkah-langkah konkret yang diterapkan, seperti peninjauan tata ruang, zonasi banjir, pembatasan pembangunan, peningkatan sistem drainase, penyerapan air, serta pemberian edukasi kepada masyarakat, membentuk fondasi yang kokoh untuk pembangunan yang adaptif dan berkelanjutan. Hasil pemetaan risiko, yang didasarkan pada analisis data

historis, pemetaan topografi, dan partisipasi masyarakat, membantu merumuskan strategi mitigasi yang efektif.

Kepedulian BPBD terhadap karakteristik wilayah dan partisipasi ahli serta masyarakat menunjukkan komitmen yang serius dalam melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak bencana banjir. Pendekatan ini juga mencerminkan perpaduan antara upaya penguatan infrastruktur fisik dan edukasi yang berfokus pada kesadaran masyarakat, menghasilkan rencana tata ruang yang mengoptimalkan pencegahan dan respons terhadap risiko banjir. Komitmen BPBD dalam terus memantau dan memperbarui pemetaan risiko dengan melibatkan lembaga penelitian, ahli, dan partisipasi masyarakat, menunjukkan kesiapan mereka untuk menghadapi perubahan kondisi dan menyempurnakan langkah-langkah preventif. Kesimpulan ini mempertegas bahwa BPBD Kota Tangerang memiliki pandangan jangka panjang dalam membangun wilayah yang lebih tahan terhadap banjir dan siap menghadapi tantangan masa depan. Koordinasi yang solid antara berbagai langkah pencegahan, pemetaan risiko, dan keterlibatan masyarakat, menjadikan BPBD sebagai agen penting dalam melindungi masyarakat serta mengurangi kerentanan wilayah terhadap ancaman banjir.

c. Kesiapsiagaan (*Preparedness*) Manajemen Bencana Banjir

Kesiapsiagaan (*Preparedness*) adalah serangkaian latihan yang dilakukan untuk mengantisipasi kegagalan melalui asosiasi dan melalui kemajuan yang tepat dan berhasil. Contoh latihan kesiapsiagaan merancang dan mengikuti pola tanggap bencana yang substansial dan terbaru yang dapat diterapkan ketika pengaturan khusus diperlukan untuk kegiatan krisis atau darurat, misalnya, mengevakuasi penghuni atau memindahkan mereka sebentar ke tempat perlindungan yang aman, memberikan fasilitas untuk kegiatan evakuasi pemberangkatan, komunikasi gawat darurat, pendidikan dan kesadaran masyarakat serta persiapan program.

Pemerintah kota Tangerang, melalui BPBD Kota Tangerang, telah berhasil meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir. Proses perencanaan evakuasi dan pelatihan petugas penanggulangan bencana telah memberikan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan oleh masyarakat dalam mengatasi ancaman banjir. Kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam upaya ini

mencerminkan komitmen yang kuat dalam melindungi dan mempersiapkan wilayah terhadap potensi bencana di masa mendatang.

Melalui seluruh hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Kepala Seksi Pencegahan BPBD Kota Tangerang, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tangerang, serta Staff Kelurahan Pedurenan, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang telah secara holistik dan proaktif melaksanakan upaya yang sangat berarti dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan terhadap risiko banjir di wilayah Pedurenan. Dalam hal ini, pelatihan petugas penanggulangan bencana menjadi pondasi utama dari strategi ini, dengan fokus pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kerja sama tim dalam menghadapi ancaman banjir.

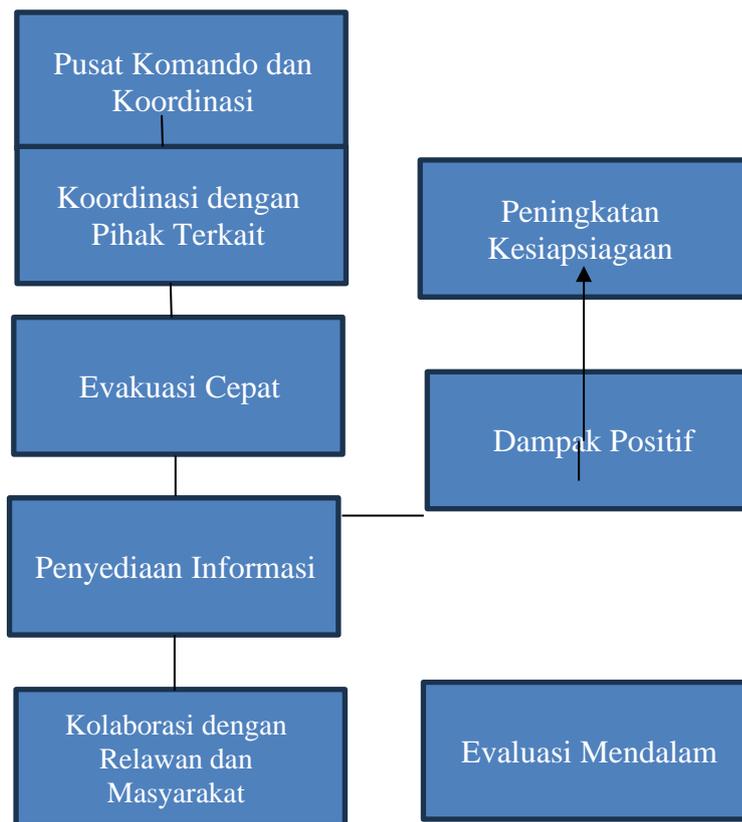
Pentingnya pelatihan untuk meningkatkan kesiapsiagaan ditekankan oleh Kepala Seksi Pencegahan BPBD, sementara Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD menjelaskan secara rinci langkah-langkah perencanaan evakuasi yang mencakup pemetaan wilayah evakuasi, evaluasi risiko dan kapasitas tempat evakuasi, serta kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Penerapan pendekatan partisipatif dan kolaboratif dengan masyarakat juga tergambar nyata, menjadi landasan penting dalam membangun kesiapsiagaan yang lebih kuat.

Tanggapan dari Staff Kelurahan Pedurenan menguatkan bahwa usaha pemerintah dan BPBD Kota Tangerang telah memberikan hasil positif secara langsung kepada masyarakat. Pelatihan yang diselenggarakan telah memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merespon bencana banjir, sekaligus mempererat keterlibatan mereka dalam menjaga kesiapsiagaan wilayah. Kesimpulan yang dapat diambil adalah komitmen dan kerja keras yang ditunjukkan oleh BPBD dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tanggap terhadap risiko banjir, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan, pelatihan, hingga respons terhadap bencana. Sebagai akibatnya, langkah-langkah ini memiliki potensi positif dalam mengurangi risiko dan dampak bencana banjir di Kota Tangerang, serta membentuk masyarakat yang lebih siap dan tahan dalam menghadapi tantangan masa depan.

d. Reaksi Cepat (*Response*) Manajemen Bencana Banjir

Reaksi Cepat (*Response*) khususnya bahwa respons cepat biasanya dapat dilakukan secepat atau secepat mungkin selama atau setelah bencana terjadi. Kegiatan-kegiatan tersebut pada dasarnya ditujukan untuk menyelamatkan nyawa dan menjaga harta benda, serta untuk mengelola gangguan, bahaya, dan dampak langsung lainnya yang diakibatkan oleh bencana tersebut. Contoh kegiatan menyediakan makanan, tempat tinggal (posko), dan pengobatan darurat, dan lain-lain.

Dalam penerapannya terkait dengan reaksi cepat manajemen bencana oleh badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) dalam menanggulangi banjir di kelurahan pedurenan kecamatan karang tengah kota tangerang tahun (2020), terdapat sebuah alur dalam manajemen bencana oleh badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), seperti berikut :



Gambar 3 Alur dari Penerapan Reaksi Cepat

BPBD Kota Tangerang telah mengambil langkah-langkah konkret dalam menyediakan bantuan medis dan makanan selama merespons banjir, termasuk dalam kasus banjir di Kelurahan Pedurenan tahun 2020. Kesehatan dan kebutuhan pangan masyarakat menjadi

prioritas utama, dan kami bekerja keras untuk memastikan bahwa bantuan tersebut dapat diakses dengan cepat dan efektif oleh mereka yang membutuhkan. Hal serupa juga disampaikan oleh staff kelurahan pedurenan selaku masyarakat yang terkena dampak dari banjir di kelurahan pedurenan pada tahun 2020

Kelurahan Pedurenan mengakui dan mengapresiasi pendekatan komprehensif BPBD Kota Tangerang dalam merespons banjir dan mengatasi situasi darurat. Langkah-langkah yang telah diambil, termasuk prosedur mobilisasi tim penanggulangan bencana dan pelatihan yang diselenggarakan, telah membantu masyarakat merasa lebih siap dan mampu merespon bencana dengan lebih baik. Hal ini mencerminkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun kesiapsiagaan dan resiliensi terhadap ancaman banjir di Kelurahan Pedurenan. Kesimpulan ini menggambarkan komitmen BPBD dalam melindungi dan membantu masyarakat dalam menghadapi bencana serta menjadikan masyarakat lebih siap menghadapi tantangan masa depan.

Dari seluruh hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait yang telah peneliti lakukan, termasuk Kepala Seksi Pencegahan BPBD Kota Tangerang, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tangerang, serta staff Kelurahan Pedurenan, menggambarkan komitmen dan kemampuan BPBD Kota Tangerang dalam mengatasi ancaman banjir dengan respons cepat dan efektif. Langkah-langkah tanggap darurat yang terstruktur, seperti aktivasi pusat komando dan kontrol, koordinasi lintas instansi, evakuasi terencana, penyediaan informasi kepada masyarakat, dan kolaborasi dengan relawan, telah membantu mengurangi dampak negatif pada masyarakat dan wilayah terdampak. Proses mobilisasi tim penanggulangan bencana yang responsif dan terkoordinasi, termasuk persiapan peralatan dan briefing, serta evaluasi pasca-kejadian, merupakan bagian integral dari strategi respons darurat yang diterapkan oleh BPBD. Masyarakat dari Kelurahan Pedurenan mengapresiasi pendekatan komprehensif BPBD dan merasa lebih siap dalam menghadapi bencana di masa depan. Kolaborasi yang erat antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun kesiapsiagaan dan resiliensi menggambarkan langkah positif dalam mengatasi tantangan banjir dan menghadapi masa depan yang lebih tanggap terhadap risiko bencana

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini mengenai 4 indikator diantaranya Pencegahan (*Prevention*), Mitigasi (*Mitigation*), Kesiapsiagaan (*Preparedness*), Reaksi Cepat (*Response*) persoalan Manajemen Bencana yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan menunjukkan bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan dan apa yang dilaksanakan dari hasil persepsi maupun dari artikulasi daerah. Hal ini juga didukung dengan adanya berbagai proyek, latihan dan sosialisasi yang terlaksana dengan baik dan terlaksana dengan baik serta daerah juga turut membantu Pemerintah Daerah, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang dalam menanggulangi bencana yang terjadi, dan dukungan dari beberapa kantor disertakan. ada Kota Tangerang. Namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki agar semuanya berjalan ideal mulai saat ini.

KESIMPULAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang telah mengadopsi pendekatan *holistik* dan *proaktif* dalam manajemen bencana, terutama dalam mengatasi risiko banjir di kelurahan Pedurenan. Melalui upaya pencegahan yang melibatkan pemetaan risiko, peningkatan sistem drainase, penyuluhan kepada masyarakat, serta kolaborasi lintas-instansi, BPBD telah berhasil mengurangi dampak potensi bencana banjir. Program KENCANA (Kecamatan Tangguh Bencana) menjadi bukti nyata keberhasilan dalam membangun ketahanan dan koordinasi di tingkat kecamatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen bencana oleh BPBD Kota Tangerang dalam menanggulangi banjir meliputi pendekatan pencegahan yang menjadi fokus utama. Upaya berkelanjutan dalam penguatan infrastruktur tahan banjir, peningkatan kapasitas alam untuk menyerap air, serta pendidikan dan kesadaran masyarakat, membentuk fondasi kokoh dalam merencanakan pembangunan adaptif dan berkelanjutan. Selain itu, pendekatan holistik terlihat dari koordinasi yang solid antara berbagai langkah pencegahan, pemetaan risiko, dan partisipasi masyarakat. Dalam upaya meminimalisir efek bencana, BPBD Kota Tangerang telah menerapkan pelatihan petugas penanggulangan bencana sebagai fondasi utama strategi mereka. Kerja sama tim, pengetahuan, dan keterampilan menjadi fokus utama dalam menghadapi ancaman banjir. Pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelatihan, dan respons bencana juga memperkuat kesiapsiagaan. Dukungan pemerintah dan kerja keras BPBD terbukti memberikan hasil positif langsung kepada masyarakat, meningkatkan

kemampuan merespon banjir, serta mempererat keterlibatan masyarakat dalam menjaga kesiapsiagaan wilayah.

Secara keseluruhan, manajemen bencana oleh BPBD Kota Tangerang telah mencakup indikator pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan respons dengan baik. Program-program, kegiatan, dan kerja sama yang dilakukan dengan baik, serta partisipasi aktif masyarakat, telah membentuk lingkungan yang lebih aman dan responsif terhadap risiko banjir di Kota Tangerang. Meskipun ada aspek yang masih perlu diperbaiki, kerja keras dan visi jangka panjang BPBD memberikan potensi positif dalam mengurangi risiko dan dampak bencana banjir di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Awusi, B. A., Nayoan, H., & Tompodung, J. (2018). *Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kota Manado Dalam Upaya Penanggulangan Korban Bencana Banjir*. Jurnal Eksekutif, 1(1).
- Bagir Manan. 2001. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: Alumni
- Carter, W. Nick. *Disaster Management : A Disaster Manager's Handbook*. Asian Development Bank, 1991
- Chrisdawati Angrelia, Rendy Prihastha, Anjas Chusni Mubarak (2020). *Peranan Pemerintah Kota Tangerang Dalam Penanggulangan Dan Pencegahan Banjir Tahun 2020* .Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi Volume 8– Nomor 1, Mei 2020.
- Dio Mahardika, Endang Larasati, (2018). *Manajemen Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kota Semarang*.
- Husein, A., & Onasis, A. (2017). *Manajemen Bencana. Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan*.
- H.R, Ridwan. (2002). *Hukum Administrasi Negara*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. Kunarjo.
- Masri Singaribum dan Sofyan Effendi (1998), *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, Hal.34
- Murdiyanto, & Gutomo, T. (2015). *Bencana Alam Banjir Dan Tanah Longsor Dan Upaya Masyarakat Dalam Penanggulangan*. Jurnal PKS, 14(4), 437–452.
- Muh. Wahyudi, Ruskin Azikin, Samsir Rahim (2019). *Manajemen Penanggulangan Banjir Di Kelurahan Paccerrakkang Kota Makassar* Volume 5 Nomor 1 : Jurnal Administrasi Publik.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. (2003). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1-*. 2. Jakarta : Rineka Cipta. 8. Hasibuan, Malayu S.P. 2011.
- Ndraha, Taliziduhu, (2010). *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, RinekaCipta.
- Ndraha, Taliziduhu. (2011). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Ogtavianus F. Salles, S. E. Pangemanan, Frans. C. Singkoh (2020), *Manajemen Pemerintah Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Manado (Studi Di Kecamatan Paal 2)* Volume 2 No.5 Tahun 2020 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi.
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun (2008) tentang Badan Penanggulangan Bencana
- Sinaga, S. N. (2015). *Peran Petugas Kesehatan dalam Manajemen Penanganan Bencana Alam*. Jurnal Ilmiah Integritas.
- Susanto, A.B. 2006. *Disaster Management di Negeri Rawan Bencana*. Jakarta: Aksara Grafika Pratama.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun (2007) tentang Penanggulangan Bencana Pasal 10 ayat (1) & Pasal 18.
- Warto, A., Sunit, T. & Nugroho P. P. 2002. *Pengkajian Manajemen Penanggulangan Korban Bencana pada Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Alam dalam Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Departemen Sosial RI
- Yusuf Falaq, Mifthatul Rahmawaty Jannah, Dan Riska Rohmatunnisa (2021), *Manajemen Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Banjir Di Desa Muaro Jambi*, Proceeding The 1th NCESCO: National Conference On Educational Science And Counseling Volume 01 No 01 Tahun 2021, 71-80.
- Zahra Madina Hirnima. (2017). *Studi Deskriptif Dampak Pengembangan Capacity Building Organisasi Pada Tingkat Responsivitas Tanggap Darurat Bencana Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo*. Hlm. 1-13.